

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada bab kajian pustaka ini, dikemukakan teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian. Dalam bab ini peneliti akan mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan topik penelitian.

2.1.1 Audit

2.1.1.1 Pengertian Audit

Audit merupakan suatu tindakan yang membandingkan antara fakta atau keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya ada. Pada dasarnya audit bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan dan menilai atau melihat apakah yang ada telah sesuai dengan keadaan yang seharusnya ada.

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens yang dialih bahasakan oleh Amir Abdi Jusuf (2012:4), mendefinisikan auditing sebagai berikut:

“Pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Selanjutnya, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens mengemukakan bahwa definisi tersebut memiliki unsur-unsur yang penting yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Informasi dan kriteria yang telah ditetapkan
- 2) Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti.
- 3) Kompeten dan independen.
- 4) Pelaporan.

Agar lebih jelasnya penjelasan mengenai unsur-unsur yang penting adalah sebagai berikut :

1. Informasi dan kriteria yang telah ditetapkan.

Untuk melakukan auditing harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut, kriteria untuk mengevaluasi informasi juga bervariasi, tergantung pada informasi yang sedang diaudit.

2. Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti.

Bukti adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

3. Kompeten dan independen.

Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut. Selain itu, para auditor berusaha keras mempertahankan tingkat independensi yang tinggi untuk menjaga kepercayaan para pemakai yang mengandalkan laporan mereka.

4. Pelaporan.

Laporan seperti ini, memiliki sifat yang berbeda-beda, tetapi semuanya harus memberitahukan kepada para pembaca tentang derajat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Sukrisno Agoes (2014:4), pengertian auditing adalah sebagai berikut:

“Auditing adalah suatu audit yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Sedangkan menurut Mulyadi (2008:9) pengertian Auditing adalah”

“Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Pengertian auditing yang diungkapkan Amin Widjaja Tunggal menjelaskan bahwa yang disebut dengan proses sistematis adalah serangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur, dan terorganisasi untuk memperoleh dan mengevaluasi hasil pemeriksaan (bukti) tanpa memihak dan berprasangka, baik untuk perorangan atau entitas yang membuat informasi dalam laporan keuangan. Informasi

yang dibuat oleh perorangan atau entitas diidentifikasi dan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu standar yang digunakan sebagai dasar untuk menilai informasi dalam laporan keuangan atau pernyataan yang telah dibuat kemudian setelah selesai dibandingkan disampaikan hasil berupa laporan tertulis yang menunjukkan derajat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu mereka yang menggunakan (atau mengandalkan) temuan auditor. Dalam lingkungan bisnis, mereka adalah para pemegang saham, manajemen, kreditor, kantor pemerintah, dan masyarakat luas.

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara kritis dan sistematis untuk memperoleh bukti dan mengevaluasi bukti yang telah disusun oleh manajemen untuk mengetahui kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, untuk penyampaian hasil-hasil laporan audit kepada pemakai yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal manajemen.

2.1.1.2 Jenis-jenis Audit

Adapun menurut Mulyadi (2008:30) menyatakan bahwa jenis audit terdiri atas tiga golongan, yaitu:

- 1) Audit Laporan Keuangan (*Financial Statmen Audit*)
- 2) Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)
- 3) Audit Operasional (*Operational Audit*)

Agar lebih jelasnya penjelasan mengenai jenis audit adalah sebagai berikut:

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statmen Audit*)

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit Kepatuhan adalah audit yang tugasnya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi atau bagian dari padanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan dari audit operasional adalah:

- a. Mengevaluasi kinerja
- b. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
- c. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lanjut.”

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens yang dialih bahasakan oleh Amir Abdi Jusuf (2012:16) audit dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan jenis pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

1. Audit Operasional.

2. Audit Ketaatan.

3. Audit Laporan Keuangan.

Dari ketiga jenis audit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Audit Operasional

Audit Operasional adalah audit yang mengevaluasi efisiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Dalam audit operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi computer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain di mana auditor menguasainya.

2. Audit Ketaatan

Audit ketaatan adalah audit yang dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.

3. Audit Laporan Keuangan

Dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Karena perusahaan semakin kompleks, tidak lagi cukup bagi auditor untuk hanya berfokus pada transaksi-transaksi akuntansi. Auditor juga harus memahami entitas dan lingkungannya secara mendalam. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang industri klien berikut lingkungan peraturan dan operasinya, termasuk hubungan eksternal, seperti dengan pemasok, pelanggan, dan kreditor.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:10) Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

1. Pemeriksaan Umum (General Audit)
2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit)

Dari kedua luasnya audit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Umum (General Audit)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan standar Professional Akuntan Publik dan memperhatikan kode etik akuntan indonesia, aturan etika KAP yang

telah disahkan Ikatan Akuntan Indonesia serta standar pengendalian mutu.

2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan Auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Misalnya KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan pada penagihan piutang usaha perusahaan. Dalam hal ini prosedur audit terbatas untuk memeriksa piutang, penjualan dan penerimaan kas. Pada akhir pemeriksaan KAP hanya memberikan pendapat apakah terdapat kecurangan atau tidak terhadap penagihan piutang usaha di perusahaan. Jika memang ada kecurangan, berapa besar jumlahnya dan bagaimana modus operandinya.

2.1.1.3 Jenis-jenis Auditor

Alvin A.Arens, Randal J.Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Amir Abdi Jusuf (2012:15) mengemukakan tiga jenis auditor, yaitu:

1. Kantor Akuntan Publik (KAP)
2. Auditor Internal Pemerintah
3. Auditor Pajak

Dari ketiga jenis auditor di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kantor Akuntan Publik (KAP)

KAP bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersil lebih kecil. Oleh karena luasnya pengguna laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan KAP dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. Sebutan KAP mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. KAP sering kali disebut audit eksternal atau audit independen untuk membedakannya dengan audit internal.

2. Auditor Internal Pemerintah

Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. Audit BPKP juga sangat dihargai dalam profesi audit.

3. Auditor Pajak

Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utamanya adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT tersebut sudah memenuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan itu disebut auditor pajak.

Menurut Mulyadi (2008:63) berdasarkan kelompok atau pelaksana audit, jenis audit dibagi 4 yaitu:

1. Auditor Eksternal
2. Audit Internal
3. Auditor Pajak
4. Auditor Pemerintahan

Dari keempat kelompok atau pelaksana audit diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Auditor Eksternal: Auditor *ekstern/independent* bekerja untuk Kantor Akuntan Publik yang statusnya diluar struktur perusahaan yang mereka audit. Umumnya auditor ekstern menghasilkan laporan atas *Financial* audit.
2. Audit Internal: Auditor *Intern* bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Laporan audit manajemen umumnya berguna bagi manajemen perusahaan yang diaudit. Oleh karena itu tugas internal auditor biasanya adalah mengaudit manajemen yang termasuk *compliance* audit.

3. Auditor Pajak: auditor pajak bertugas melakukan pemeriksaan ketaatan ketataatn wajib pajak yang diaudit terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku.
4. Auditor Pemerintahan: Tugas auditor pemerintahan adalah menilai kewajaran informasi keuangan yang disusun oleh institusi pemerintah. Disamping itu audit juga dilakukan untuk menilai efisiensi, efektifitas, dan ekonomisasi operasi program dan penggunaan barang milik pemerintah, sering juga audit atas ketaatan pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Auditing yang dilakukan pemerintah dapat dilaksanakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Abdul Halim (2015: 8) klasifikasi audit berdasarkan pelaksana audit dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Auditing Eksternal
2. Auditing Internal
3. Auditing Sektor Publik

Dari klasifikasi audit berdasarkan pelaksana audit diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Auditing Eksternal

Auditing eksternal merupakan suatu kontrol sosial yang memeberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan

yang di audit. Auditornya adalah pihak luar perusahaan yang independen. Pihak di luar perusahaan yang independen adalah akuntan publik yang telah diakui oleh yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.

2. Auditing Internal

Auditing internal adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektifitas organisasi. Informasi yang dihasilkan, ditunjukkan untuk manajemen organisasi itu sendiri. Auditor internal bertanggungjawab terhadap pengendalian intern perusahaan demi tercapainya efisiensi, efektifitas, dan ekonomis serta ketaatan pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan.

3. Auditing Sektor Publik

Auditing sector publik adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat, seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Audit dapat mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, maupun audit operasional. Auditornya adalah auditor pemerintah dan dibayar oleh pemerintah.”

Menurut Abdul Halim (2015: 11) Auditor yang ditugaskan dalam mengaudit pada umumnya diklasifikasikan kedalam tiga kelompok yaitu:

1. Auditor Internal

2. Auditor Pemerintah

3. Auditor Independen (Akuntan Publik)

Dari klasifikasi tugas dalam mengaudit seperti yang di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Auditor Internal

Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Tujuan dari auditing internal adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Auditor internal terutama berhubungan dengan audit operasional dan audit kepatuhan.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas utamanya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari berbagai unit organisasi dalam pemerintahan. Auditing ini dilaksanakan oleh auditor pemerintah yang bekerja di BPKP dan BPK.

3. Auditor Independen (Akuntan Publik)

Auditor independen adalah para praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien. Klien dapat berupa perusahaan bisnis yang berorientasi laba, organisasi nirlaba, badan-badan pemerintahan, maupun individu perseorangan. Di samping itu, auditor juga menjual jasa lain yang berupa konsultasi pajak, konsultasi manajemen, penyusunan sistem akuntansi,

penyusunan laporan keuangan, serta jasa-jasa lainnya. Auditor independen sesuai dengan sebutannya harus bekerja dengan independen kepada klien pada saat melaksanakan audit maupun saat pelaporan hasil audit. Auditor independen melakukan pekerjaannya di bawah suatu kantor akuntan publik.

2.1.1.4 Laporan Auditor

Auditor harus bertanggung jawab atas penertiban laporan audit. Auditor perlu melakukan pertimbangan jenis opini untuk jenis opini apa yang harus dikeluarkan. Pertimbangan untuk menentukan kewajaran atas laporan keuangan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi dalam suatu perusahaan.

Laporan audit memiliki beberapa kategori, ada empat kategori laporan audit menurut Amin Widjaja Tunggal (2011:181) yaitu:

1. Laporan Standar Tanpa Pengecualian
2. Laporan Tanpa Pengecualian dengan paragraph penjelasan dan modifikasi kata
3. Dengan Pengecualian
4. Tidak Memberikan Opini atau Opini Tidak Wajar.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2011:173) standar laporan audit tanpa pengecualian memiliki tujuh bagian yang terpisah yaitu:

1. Judul Laporan.
2. Alamat Laporan Audit.
3. Paragraf Pembuka.
4. Paragraf Ruang Lingkup.
5. Paragraf Opini.
6. Tanda Tangan.
7. Tanggal Laporan Audit.

Dari standar laporan audit tanpa pengecualian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Judul Laporan. Standar audit mensyaratkan bahwa laporan harus diberi judul dan judulnya memasukkan kata independen. Misalnya judul yang tepat adalah “laporan auditor independen” atau “opini akuntan independen”. Persyaratan tersebut menegaskan kepada penggunaan laporan keuangan bahwa audit tidak bias dalam segala aspek.
2. Alamat Laporan Audit. Laporan biasanya dialamatkan kepada perusahaan, pemegang sahamnya, atau dewan direksi. Pada tahun terakhir ini, laporan tersebut biasanya khusus dialamatkan kepada dewan direksi dan pemegang saham untuk mengidentifikasi bahwa auditor bersifat independen atas perusahaan.
3. Paragraf Pembuka. Paragraf pertama laporan terdiri atas tiga hal: Pertama, berisi pernyataan sederhana bahwa KAP sudah menyelesaikan audit. Hal ini bermaksud untuk membedakan laporan ini dengan kompilasi laporan telaah. Kedua berisi daftar laporan keuangan yang akan diaudit termasuk tanggal neraca dan periode akuntansi untuk laporan laba/rugi dan pelaporan aliran kas. Ketiga paragraf pembuka menyatakan bahwa laporan ini adalah tanggung jawab manajemen dan bertanggung jawab auditor adalah memberikan opini atas laporan berdasarkan audit.
4. Paragraf Ruang Lingkup. Paragraf ruang lingkup merupakan pernyataan faktual mengenai apa yang dilakukan auditor dalam audit paragraf

ruang lingkup menyatakan bahwa audit didesain untuk mendapatkan kepastian yang wajar bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

5. Paragraf Opini. Paragraf terakhir dalam laporan standar menyatakan tentang simpulan auditor berdasarkan hasil audit. Bagian laporan ini sangat penting sehingga seluruh laporan audit merujuk pada opini auditor. Paragraph opini dinyatakan dalam bentuk opini dan bukan pernyataan atau fakta absolute atau jaminan.
6. Tanda Tangan. Nama Akuntan Publik, nomor lisensi akuntan publik, dan nomor lisensi kantor akuntan publik.
7. Tanggal Laporan Audit. Tanggal pelaporan yang tepat adalah salah satu yang harus dipenuhi dalam prosedur audit dilapangan. Tanggal ini penting bagi pengguna laporan karena mengindikasikan tanggal terakhir pertanggung jawaban auditor dalam melakukan telaah atas kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan.

Adapun kondisi-kondisi yang perlu dipenuhi menurut Amin Widjaja Tunggal (2011:179) adalah sebagai berikut:

1. Seluruh laporan-neraca, laporan laba/rugi, laporan saldo laba, dan laporan aliran kas-dimasukan dalam laporan keuangan.
2. Tiga standar umum diikuti dalam seluruh penugasan.
3. Bukti yang tepat dalam memadai telah diakumulasi dan auditor melakukan penugasan sesuai dengan cara yang membuat ia dapat memastikan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan sudah dipenuhi.

4. laporan keuangan dinyatakan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hal ini juga berarti pengungkapan yang dimasukkan dalam penjelasan tambahan dalam bagian lain dalam keuangan sudah memadai.
5. Tidak ada keadaan yang memerlukan paragraph penjelasan tambahan atau modifikasi dalam laporan.

Laporan audit tanpa pengecualian diterbitkan dengan kata-kata yang berbeda dengan laporan standar tanpa pengecualian. Laporan audit tanpa pengecualian dengan paragraph penjelasan atau modifikasi kata juga telah memenuhi kriteria audit hasil yang memadai dan laporan keuangan yang disajikan dengan wajar, tetapi auditor yakin perlunya menyediakan informasi tambahan.

Adapun penyebab utama dari adanya paragraph penjelasan atau modifikasi kata dalam laporan standar tanpa pengecualian menurut Amin Widjaja Tunggal (2011:182):

1. Kurangnya penerapan konsisten atas prinsip akuntansi atas prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Keraguan atas kelangsungan usaha perusahaan.
3. Auditor menyetujui adanya perbedaan dengan prinsip yang wajib diterapkan.
4. Penekanan atas suatu hal.
5. Pelaporan yang melibatkan auditor lain.

Opini dengan pengecualian berbeda dengan opini tanpa pengecualian. Laporan opini pengecualian adalah laporan yang dapat dihasilkan dari pembatasan ruang lingkup auditor atau tidak diterapkannya prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan opini dengan pengecualian dapat digunakan hanya saat auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan dinyatakan wajar. Apabila laporan keuangan menyesatkan karena tidak dinyatakan sesuai dengan posisi keuangan atau hasil operasi dan arus kas maka opini yang diberikan auditor adalah

opini tidak wajar. Laporan yang keseluruhannya oleh auditor dinyatakan dengan tidak wajar maka auditor tidak akan memberikan opini. Perbedaan antara tidak memberikan dan opini tidak wajar terletak pada kurangnya pengetahuan. Oleh sebab itu auditor harus memiliki pengetahuan bahwa laporan keuangan tidak dinyatakan dengan wajar untuk menerbitkan opini tidak wajar.

2.1.2 Pengalaman Auditor

2.1.2.1 Pengertian Pengalaman Auditor

Kompetensi teknis berupa pengalaman kerja auditor merupakan kemampuan individu dan dianggap menjadi faktor penting dalam pertimbangan audit. Dilihat dari segi jenis audit, pengetahuan dan pengalaman akan membantu dalam pengambilan keputusan.

Menurut Mulyadi (2008:24) mendefinisikan bahwa:

“Pengalaman auditor merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui interaksi”

Menurut Mulyadi (2008:25)

“Jika seseorang memasuki karier sebagai akuntan publik, ia harus lebih dulu mencari pengalaman profesi dibawah pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman. Disamping itu, pelatihan teknis yang cukup mempunyai arti pula bahwa akuntan harus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha dan profesinya, agar akuntan yang baru selesai menempuh pendidikan formalnya dapat segera menjalani pelatihan teknis dalam profesinya, pemerintahan mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktek dalam profesi akuntan public (SK Menti Keuangan No.43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997).”

Menurut Ashton dalam Jamilah dkk (2007):

“Pengalaman auditor merupakan kemampuan yang dimiliki auditor atau akuntan pemeriksa untuk belajar dari kejadian-kejadian masalah yang berkaitan dengan seluk-beluk audit atau pemeriksaan”

Dalam pernyataan diatas, bahwa seorang yang melaksanakan tugas audit adalah orang yang benar-benar memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor dan bisa dikatakan keahlian dan pelatihan teknis tersebut diperoleh auditor dari pengalamannya yaitu lamanya ia bekerja sebagai auditor, frekuensi melakukan tugas audit dan pendidikan berkelanjutan.

2.1.2.2 Faktor-faktor Pengalaman Auditor

Auditor yang mempunyai pengalaman audit lebih banyak akan menemukan kesalahan lebih banyak dan item-item kesalahan yang dilakukan lebih kecil dibandingkan dengan auditor yang mempunyai pengalaman yang lebih sedikit. Selain itu, auditor yang berpengalaman akan mempertimbangkan pelanggaran yang terjadi.

Menurut Arens (2012:289) mengatakan bahwa :

“The engagement may require more experienced staff. CPA firms should staff all engagements with qualified staff. For low acceptable audit risk clients, special care is appropriate in staffing, and the importance of professional skepticism should be emphasized.”

Selain itu Ida Suraida (2005) menyebutkan bahwa ada 2 faktor pengalaman auditor yaitu:

- a. Lamanya auditor bekerja dibidang audit
- b. Banyak nya penugasan audit yang pernah ditangani

Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, sehingga pengalaman dimasukan ke dalam satu persyaratan dalam memperoleh izin menjadi Akuntan Publik (SK Menkeu No. 17/PMK.01/2008) mengenai jasa yang diberikan akuntan publik yaitu :

“Seorang akuntan publik harus memiliki pengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan yang paling sedikit 1000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dan paling sedikit 500 (Lima Ratus) jam diantaranya memimpin dan/ atau mensupervisi perikatan audit umum yang disahkan oleh Pemimpin/Pemimpin Rekan KAP.”

Dari ketentuan di atas dijelaskan bahwa menjadi seorang auditor yang berpengalaman harus memiliki 5 tahun atau paling sedikit 500 jam dalam masa kerjanya sebagai auditor.

2.1.2.3 Dimensi Pengalaman Auditor

Dari pernyataan mengenai pengalaman tugas seseorang, untuk setiap penugasan, Kantor Akuntan Publik (KAP) harus menugaskan staf yang berkualifikasi guna mendapat risiko audit yang diterima rendah dengan cara perhatian khusus harus diberikan dalam memilih staf, dan pentingnya skeptisisme profesional dalam mengaudit. Maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman terhadap tugas yang dilakukan atau banyaknya tugas yang dilakukan seseorang maka akan meningkatkan dan memperoleh banyak pengetahuan, sehingga kepercayaan diri auditor akan bertambah besar. Apabila seorang auditor banyak

melakukan tugas auditnya maka dia akan terbiasa dan akan memperoleh lebih banyak pengetahuan.

Menurut Mulyadi (2008:23) ada tiga dimensi dalam pengalaman auditor, diantaranya adalah:

1. Pelatihan Profesi
2. Pendidikan
3. Lama Kerja.

Dari ketiga faktor dalam pengalaman auditor diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelatihan Profesi

Pelatihan profesi berupa kegiatan-kegiatan seperti seminar, symposium, lokakarya, dan kegiatan penunjang keterampilan yang lain. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, pengarahan yang diberikan oleh auditor senior kepada auditor junior juga bisa dianggap sebagai salah satu bentuk pelatihan karena kegiatan ini dapat meningkatkan kerja auditor, melalui program pelatihan dan praktik.praктик audit yang dilakukan para auditor juga mengalami proses sosialisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang akan ia temui, struktur pengetahuan auditor yang berhubungan dengan pendekteksian.

Kekeliruan mungkin akan berkembang dengan adanya program pelatihan auditor ataupun dengan bertambahnya pengalaman auditor. Akuntan harus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia ysaha dan profesinya agar

akuntan yang baru selesai menempuh pendidikan formalnya dapat segera menjalani pelatihan teknis dalam profesinya, pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik dibidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik (SK Menteri Keuangan No.43/KMK.017/1997).

2. Pendidikan

Pendidikan adalah keahlian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan pendidikan formal yang diperluas dengan pengalaman praktik audit. Pendidikan dalam arti luas adalah pendidikan formal, pelatihan, atau pendidikan lanjut. Pendidikan formal, pelatihan atau pendidikan lanjut yang dibutuhkan untuk menjadi akuntan public adalah:

- a. Sudah menempuh pendidikan dibidang akuntansi (S1 Akuntansi + Ppak)
- b. *On the job training* selama 1.000 jam sebagai ketua tim audit/supervisor
- c. Lulus ujian sertifikat akuntan publik
- d. Mengurus izin akuntan public kepada Departemen Keuangan untuk dapat melakukan kegiatan usahanya secara independen (membuka KAP)

3. Lama Kerja

Lama kerja adalah pengalaman seseorang dan berapa lama seseorang berkerja pada masing-masing pekerja atau jabatan. Lama kerja auditor yang dimaksud adalah 1000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir atau seberapa lama waktu yang digunakan oleh auditor dalam mengaudit industri klien tertentu dan seberapa lama auditor mengikuti jenis penugasan audit tertentu.

Bekerja dengan orang yang memiliki perbedaan latar belakang, perspektif atau sering membuat agenda akan mengembangkan pengalaman dalam bekerja. Salah satu cara untuk memiliki pengalaman audit dalam bekerja adalah dengan memiliki jam kerja menjadi auditor atau lamanya menjadi auditor.

Dalam Jamilah (2012) menyatakan bahwa :

“Lamanya bekerja sebagai auditor menghasikan struktur dalam proses pemahaman auditor. Pemahaman auditor dengan mengintrepretasikan arti dan implikasi informasi-informasi spesifik, struktur-struktur untuk menentukan seleksi auditor memahami dan bereaksi terhadap ruang lingkup tugas”

Dengan memiliki jam kerja menjadi auditor, kemampuan auditor dapat ditingkatkan dengan tujuan untuk mengantisipasi semua keadaan yang mungkin dihadapi akibat tuntutan pekerjaan secara profesional. Ketika seorang auditor yang telah memiliki jam kerja yang lebih banyak akan dengan mudah menghadapi perubahan yang sedang terjadi.

2.1.3 Tekanan Ketaatan

2.1.3.1 Pengertian Tekanan Ketaatan

Tekanan ketaatan adalah jenis tekanan pengaruh sosial yang dihasilkan ketika individu dengan perintah langsung dari perilaku individu lain. Berikut ini adalah pengertian-pengertian dari tekanan ketaatan yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

Menurut Veithzal yang dialihbahasakan oleh Rifai (2011:516) adalah:
 “Perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan”.

Mangkunegara (2013:29) menyatakan bahwa tekanan ketaatan adalah sebagai berikut :

“Suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seorang karyawan, dalam hal ini tekanan tersebut disebabkan oleh lingkungan pekerjaan tempatnya bekerja”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dalam hal ini tekanan ketaatan diartikan sebagai tekanan yang diterima oleh auditor junior dari auditor senior atau atasan dan entitas yang diperiksa untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari standar profesionalisme. Intruksi atasan dalam suatu organisasi akan mempengaruhi perilaku bawahan karena atasan memiliki otoritas.

2.1.3.2 Teori Tekanan Ketaatan

Seorang auditor secara terus menerus berhadapan dengan dilema etika yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. Tekanan ketaatan dari atasan untuk memeriksa laporan keuangan dan segera harus di audit, dalam keadaan ini klien bisa memengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor.

Menurut Ashton dalam Jamillah (2007) teori ketaatan yaitu sebagai berikut:

“Teori ketaatan menyatakan bahwa individu yang memiliki kekuasaan merupakan sumber yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain dengan perintah yang diberikannya. Hal ini disebabkan keberadaan kekuasaan atau otoritas yang merupakan bentuk dari *legimate power*.”

Paradigma ketaatan pada kekuasaan ini dikembangkan oleh Milgram dalam Jamillah (2007) yang berpendapat dalam teorinya bahwa:

“Bawahan yang mengalami tekanan ketaatan dari atasan akan mengalami perubahan psikologis dari seseorang yang berperilaku autonomis menjadi perilaku agen. Perubahan perilaku ini terjadi karena bawahan tersebut merasa menjadi agen dari sumber kekuasaan dan dirinya terlepas dari tanggung jawab atas apa yang dilakukannya.”

Bila terdapat perintah untuk berperilaku menyimpang dari norma, tekanan ketaatan seperti ini menghasilkan variasi pada *judgment* auditor dan memperbesar kemungkinan pelanggaran norma atau standar profesional. Eksperimen yang mempertimbangkan tekanan atas untuk melakukan perilaku yang menyimpang karena adanya kemungkinan perubahan dalam prospektif etis sejalan dengan perubahan *ranking* peran dalam organisasi. Bila pada awal karirnya auditor lebih mementingkan pemenuhan tugas praktik yang dilimpahkan padanya, dengan adanya perubahan peran dalam organisasi terdapat pula perspektif etisnya. Ada kecenderungan perubahan fokus, dari sempit (praktik dan kualitas audit) menjadi luas yang lebih menekankan pada profitabilitas organisasi hal seperti ini akan berpengaruh kepada kemampuan auditor dalam menjaga reputasi organisasi dalam hal independen dan objektivitas.

Dalam keadaan ini, atasan dari auditor itu bisa mempengaruhi proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh seorang auditor, atasan bisa menekan auditor untuk mengambil tindakan yang melanggar standar pemeriksaan, maka auditor akan berada dalam situasi konflik. Memenuhi tuntutan klien berarti melanggar standar. Namun, auditor tidak memenuhi tuntutan klien, auditor bisa mendapatkan sanksi dari klien berupa kemungkinan penghentian penugasan. (Jamillah:2007)

2.1.3.3 Faktor-faktor Tekanan Ketaatan

Menurut Feuer Stein, *et al* yang dialihbahasakan oleh Niven (2008:198) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkatan kepatuhan adalah:

a. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan klien dapat meningkatkan kepatuhan, sepanjang bahwa pendidikan tersebut merupakan pendidikan yang aktif

b. Akomodasi

Suatu usaha harus dilakukan untuk memahami ciri kepribadian klien yang dapat mempengaruhi kepatuhan adalah jarak dan waktu, biasanya orang cenderung malas melakukan ditempat yang jauh.

c. Modifikasi Faktor Lingkungan dan Sosial

Hal ini berarti membangun dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman, kelompok-kelompok pendukung dapat dibentuk untuk membantu kepatuhan terhadap program-program yang dijalankan.

d. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah seorang melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu, dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.

Menurut fungsinya pengetahuan merupakan dorongan besar untuk ingin tahu, untuk mencari penalaran, dan untuk mengorganisasikan pengalamannya. Adanya unsur pengalaman yang semula tidak konsisten dengan apa yang diketahui oleh individu akan disusun, ditata kembali atau diubah sedemikian rupa, sehingga tercapai suatu konsisten.

e. Usia

Usia adalah umur yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai saat akan berulang tahun. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan, masyarakat yang lebih dewasa akan lebih dipercaya dari pada orang yang belum cukup tingkat kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan jiwanya.

f. Dukungan Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang terdiri atas 2 orang atau lebih, adanya ikatan persaudaraan atau pertalian darah, hidup dalam satu rumah tangga berinteraksi satu sama lain, mempertahankan satu kebudayaan.

2.1.3.4 Dimensi Tekanan Ketaatan

Mangkunegara (2013:39) menyatakan bahwa tekanan ketaatan adalah sebagai berikut :

“Tekanan ketaatan adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seorang karyawan, dalam hal ini tekanan tersebut disebabkan oleh lingkungan pekerjaan tempatnya bekerja.”

Menurut Mangkunegara (2013:30) ada dua dimensi dalam tekanan ketaatan yang dihadapi auditor, yaitu :

- 1) Perintah dari atasan
- 2) Keinginan klien untuk menyimpang dari standar professional auditor

Dari kedua dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perintah dari atasan

Tekanan ini berupa perintah atasan kepada auditor yang memeriksa untuk merubah opini dengan mengabaikan bukti-bukti yang telah terkumpul agar bisa memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Sangsi yang diberikan kepada auditor yang tidak mengikuti perintah atasan yaitu, auditor tersebut tidak akan diberi penugasan lagi di entitas tersebut. Sangsi tersebut lebih jauh lagi akan berdampak pada lambatnya kenaikan jenjang karir. Atasan termotivasi melakukan hal ini disebabkan adanya hubungan yang baik antara atasan dengan entitas yang diperiksa atau adanya imbalan yang diterima oleh atasan dari entitas tersebut. Contohnya terdapat aset bernilai material yang berasal dari penyertaan modal pemerintah pusat atau daerah yang telah digunakan oleh perusahaan. Atasan memerintahkan aset yang bernilai material

di catat dulu oleh perusahaan karena jika dicatat itu akan berpengaruh pada opini yang dikeluarkan yaitu menjadi wajar dengan pengecualian.

2. Keinginan klien untuk menyimpang dari standar professional auditor

Tekanan ketaatan ini timbul akibat adanya kesenjangan ekspektasi yang terjadi antara entitas yang diperiksa dengan auditor telah menimbulkan suatu konflik tersendiri bagi auditor. Dalam suatu audit umum (general audit atau opiniom audit), auditor dituntut untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan entitas untuk menghindari adanya pergantian auditor. Pemberian opini wajar tanpa pengecualian tanpa bukti-bukti audit yang memadai, dapat berubah dari masalah standar audit (khususnya masalah standar pelaporan) ke masalah kode etik (independensi dan benturan kepentingan). Pemenuhan tuntutan entitas merupakan pelanggaran terhadap standar audit.

2.1.4 Kompleksitas Tugas

2.1.4.1 Pengertian Kompleksitas Tugas

Tugas melakukan audit cenderung merupakan tugas yang banyak menghadapi persoalan yang kompleks. Auditor dihadapkan dengan tugas-tugas yang kompleks, banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Kompleksitas audit didasarkan pada persepsi individu tentang kesulitan suatu tugas audit. Ada auditor yang mempersepsikan tugas audit sebagai tugas dengan kompleksitas tinggi dan sulit. Sementara aditor lain ada yang mempersepsikan sebagai tugas yang mudah.

Menurut Iskandar, Zuraidah (2011 : 33) mendefinisikan :

“Complex task are ambiguously defined and difficult to measure objectively”.

Auditor selalu dihadapkan dengan tugas yang banyak dan berbeda-beda dan saling terkait satu sama lain. Ada beberapa pendapat yang menyatakan pengertian dari kompleksitas tugas itu sendiri diantaranya adalah menurut Wood dalam Jammilah (2007) menyatakan bahwa :

“Sebagai tugas yang terdiri atas bagian-bagian yang banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu sama lain”

Cecillia (2007) mendefinisikan kompleksitas tugas yaitu :

“Sebagai tugas yang terdiri dari bagian-bagian yang banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu sama lain”.

Dari penjelasan tersebut kompleksitas pada penelitian ini didefinisikan sebagai tugas yang kompleks, terdiri atas bagian-bagian yang banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu sama lain.

2.1.4.2 Dimensi Kompleksitas Tugas

Dalam pelaksanaan tugasnya yang kompleks, auditor sebagai anggota pada suatu tim audit memerlukan keahlian, kemampuan dan tingkat kesabaran yang

tinggi. Menurut Bonner dalam Jammilah (2007) Terdapat tiga dimensi dari kompleksitas tugas, yaitu :

1. Tugas yang tidak terstruktur
2. Tugas yang membingungkan
3. Tugas yang sulit

Dari ketiga dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Tugas yang tidak terstruktur

Menurut Restuningdiah dan Indriantoro dalam Siti Asih Nadhiroh (2010) yang menyatakan bahwa :

“Struktur adalah terkait dengan kejelasan informasi (*information clarity*)”

Menurut pernyataan diatas kejelasan informasi ini berasal dari wewenang dan tanggung jawab dari atasan. Sedangkan apabila tugas yang tidak terstruktur tidak adanya wewenang dan tanggung jawab serta informasi yang jelas.

2. Tugas yang membingungkan

Tugas yang membingungkan merupakan salah satu faktor lain pada kompleksitas tugas. Menurut Restuningdiah dalam Siti Asih Nadhiroh (2010) menyatakan bahwa :

“Tugas-tugas yang membingungkan (ambigu) yaitu tugas yang akan membuat seseorang kesulitan untuk mengerjakannya karena terlalu banyak instruksi, begitupun dengan tugas yang tidak terstruktur, meskipun tugas tersebut adalah tugas utama atau tugas lain akan dianggap sama saja dan bisa jadi menyulitkan karena hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan. Untuk itu diperlukan sebuah kompetisi yang memadai dan dilakukan pula supervise dari para seniornya”.

Menurut pernyataan diatas tugas yang membingungkan yaitu tugas yang terlalu banyak instruksi sehingga membingungkan orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut.

3. Tugas yang sulit

Seorang auditor dituntut untuk tetap konsisten dalam menyelesaikan tugas auditnya. Sebuah tugas dibebankan oleh orang yang berkompeten dibidangnya, karena akan terdapat perbedaan persepsi dalam mendefinisikan tugas-tugas yang kompleks, seperti menurut Restuningdiah dalam Siti Asih Nadhiroh (2010) yang berpendapat bahwa :

“Beberapa tugas audit dipertimbangkan sebagai tugas dengan kompleksitas tinggi dan sulit, sementara yang lain mempersepsikannya sebagai tugas yang mudah”.

Banyaknya informasi atau tidak memiliki kejelasan instruksi itu akan menyulitkan auditor yang melakukan pekerjaan audit tersebut. Pemahaman terhadap kompleksitas tugas pada suatu manajemen audit dinilai bisa membantu solusi terbaik untuk menjadikan tugas yang kompleksitas tersebut menjadi dapat dengan mudah diselesaikan, karena diduga semakin banyak kompleksitas yang

dihadapi oleh para auditor maka akan mempengaruhi kinerja nya dalam membuat sebuah judgment, untuk itu sarana dan tehnik pembuatan keputusan serta latihan tertentu telah disesuaikan sedemikian rupa dengan keganjilan terhadap kompleksitas tugas audit.

Menurut bonner (2006 : 215), proses pengolahan informasi terdiri dari tiga tahapan, yaitu : input, proses, output. Pada tahap input dan proses, kompleksita tugas meningkat seiring bertambahnya faktor petunjuk. Terdapat perbedaan antara pengertian banyaknya petunjuk yang diadakan dengan banyaknya petunjuk yang terolah. Banyaknya petunjuk yang ada, seorang pembuat keputusan harusberusaha melakukan pemilahan terhadap petunjuk-petunjuk terebut (meliputi upaya penyaksian dan pertimbangan-pertimbangan) dan kemudian mengintegrasikan ke dalam suatu pendapat (judgement). Keputusan bisa diberikan segera bila banyak petunjuk yang diamati tidak meninggalkan batas-batas kemampuan dari seseorang pembuat keputusan.

2.1.4.3 Faktor-Faktor Kompleksitas Tugas

Menurut Iskandar Zuraidah (2011 : 33) mengemukakan bahwa kompleksitas tugas dalam pengauditan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Banyaknya informasi yang tidak relevan dalam artian informasi informasi tersebut tidak konsisten dengan kejadian yang akan diprediksikan.

- b. Adanya ambiguitas yang tinggi, yaitu beragamnya outcome (hasil) yang diharapkan dari kegiatan pengauditan.

Terkait dengan kegiatan pengauditan, tingginya kompleksitas audit ini dapat menyebabkan seorang auditor menjadi tidak konsistensi dan tidak akuntabilitas.

2.1.5 Audit Judgment

2.1.5.1 Pengertian Audit Judgment

Judgment merupakan suatu proses yang terus menerus dalam perolehan informasi (termasuk umpan balik dari tindakan sebelumnya), pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak, penerimaan informasi lebih lanjut. Proses *judgment* tergantung pada kedatangan informasi sebagai suatu proses *unfolds*. Kedatangan informasi bukan hanya mempengaruhi pilihan, tetapi juga mempengaruhi cara pilihan tersebut dibuat. Setiap langkah, didalam proses *incremental judgment* jika informasi terus menerus datang, akan muncul pertimbangan baru dan keputusan pilihan baru.

Menurut Mulyadi (2008:29) audit *judgment* adalah:

“Kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status, atau jenis peristiwa lain.”

Pengertian audit *judgment* menurut Alvin A.Arens dkk yang dialihbahasakan oleh Amir Abdi Jusuf (2012 : 55) adalah:

“*Judgment* auditor merupakan suatu pertimbangan pribadi atau cara pandang auditor dalam menanggapi informasi berhubungan dengan tanggung jawab dan risiko audit yang akan dihadapi auditor, yang mempengaruhi pembuatan opini akhir auditor terhadap laporan keuangan suatu entitas atau jenis lainnya yang mengacu pada pembentukan ide, atau perkiraan tentang objek, peristiwa, dan keadaan atau jenis lainnya dari fenomena atau pertimbangan pribadi. Pertimbangan pribadi auditor tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor perilaku individu.”

Kutipan diatas menyatakan bahwa *judgment* adalah mengacu pada pembentukan ide, pendapat atau perkiraan tentang objek, peristiwa, keadaan atau jenis lainnya dari fenomena. *Judgment* cenderung mengambil prediksi tentang masa depan atau evaluasi dari situasi saat ini.

Auditing bersifat analitikal, kritisal (mempertanyakan), investigative (menyelidiki) terhadap bentuk asersi. *Auditing* berakar pada prinsip logika yang mendasari ide dan metodenya. Oleh karena itu *judgment* dalam *auditing* merupakan suatu proses yang penting dan tidak dapat dilepaskan dalam *auditing* (Fitriani dan Daljono, 2012). Dalam pekerjaan audit, *judgment* merupakan kegiatan yang selalu digunakan auditor dalam setiap proses audit, untuk itu auditor harus terus mengasah *judgment* mereka. Tepat atau tidaknya *judgment* auditor sangat menentukan kualitas dari hasil audit dan opini yang akan dikeluarkan oleh auditor.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dipaparkan diatas, maka audit *judgment* dapat diartikan sebagai suatu kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya berdasarkan informasi mengenai suatu peristiwa, status, dan peristiwa lain.

2.1.5.2 Proses Audit *Judgment*

Judgment auditor diperlukan karena audit tidak dilakukan terhadap seluruh bukti, karena akan memakan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit, sehingga tidak efisien. Bukti ini lah yang digunakan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Audit *judgment* diperlukan empat tahap dalam proses audit atas laporan keuangan, yaitu penerimaan perikatan, perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan audit (Mulyadi 2008:96). Penjelasan proses audit *judgment* tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Perikatan
- 2) Perencanaan Audit
- 3) Pelaksanaan Pengujian Audit
- 4) Pelaporan Audit

Untuk lebih jelas dari ke empat proses audit *judgment* tersebut, berikut penjelasannya :

1. Penerimaan Perikatan

Saat auditor menerima suatu perikatan audit, maka harus melakukan audit *judgment* terhadap beberapa hal yaitu integritas manajemen, indenpendensi, objektivitas, kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan yang pada akhirnya diambil keputusan menerima atau tidak suatu perikatan audit.

2. Perencanaan Audit.

Pada saat tahap perencanaan audit, auditor harus mengenali resiko-resiko dan tingkat materialitas suatu saldo akun yang telah ditetapkan. *Judgment* pada tahap ini digunakan untuk menentukan prosedur-prosedur audit yang

selanjutnya dilaksanakan, karena *judgment* pada tahap awal audit ditentukan berdasarkan pertimbangan pada tingkat materialitas yang diramalkan.

3. Pelaksanaan Pengujian Audit

Dalam kaitannya dengan laporan keuangan, *judgment* yang diputuskan oleh auditor akan berpengaruh terhadap opini seorang auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Ada berbagai faktor-faktor pembentuk opini seorang auditor mengenai kewajaran laporan keuangan kliennya, yaitu keandalan sistem pengendalian intern klien, kesesuaian transaksi akuntansi dengan prinsip akuntansi berterima umum, ada tidaknya pembatasan audit yang dilakukan oleh klien dan konsisten pencatatan transaksi akuntansi. Karenanya, dapat dikatakan bahwa *judgment* merupakan aktivitas pusat dalam melaksanakan pekerjaan audit.

4. Pelaporan Audit

Ketetapan *judgment* yang dihasilkan oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya memberikan pengaruh signifikan terhadap kesimpulan akhir (opini) yang akan dihasilkannya. Sehingga secara tidak langsung juga akan memengaruhi tepat atau tidak tepatnya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan yang mengandalkan laporan keuangan auditan sebagai acuannya.

2.1.5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit *Judgment*

Banyak faktor yang mempengaruhi audit *judgment*, baik yang bersifat teknis maupun non teknis.

Fitriani (2012) menyatakan bahwa :

Salah satu contoh faktor teknis seperti adanya pembatasan lingkungan atau waktu audit. Sedangkan faktor non teknis seperti aspek-aspek perilaku individu yang denial dapat mempengaruhi audit *judgment* yaitu: gender, tekanan ketaan, kompleksitas tugas, pengalaman, pengetahuan, dan sebagainya.

Seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya membuat audit *judgment* dipengaruhi oleh banyak faktor, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Menurut Fitriani (2012) menyatakan bahwa:

“*Audit Judgment* merupakan suatu pertimbangan yang mempengaruhi dokumentasi bukti dan keputusan pendapat yang dibuat oleh auditor.”

judgment mengacu pada aspek kognitif dalam proses pengambilan keputusan dan mencerminkan perubahan dalam evaluasi, opini dan sikap. Kualitas *judgment* ini menunjukkan seberapa baik kinerja dalam seorang auditor dalam melakukan tugasnya,

Menurut Jammilah dkk (2007) mengemukakan beberapa tujuan dari audit *judgment* sebagai berikut :

1. Menghasilkan *Judgment* yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan dari seorang auditor
2. Seorang auditor berpegang teguh pada standar dalam menghasilkan *judgment* untuk kepentingan klien.

2.1.5.4 Dimensi Audit *Judgment*

Aspek-aspek perilaku individu tersebut dinilai sangat mempengaruhi pembuatan audit *judgment* dan akhir-akhir ini banyak menarik perhatian praktisi akuntansi, penelitian maupun akademisi. Namun demikian, meningkatnya perhatian tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan penelitian dibidang akuntansi perilaku dimana dalam banyak penelitian hal tersebut justru tidak menjadi fokus utama

Meyer 2001 dalam Jamilah dkk (2007) mengemukakan adanya 3 dimensi dari audit *judgment* antara lain sebaga berikut :

- 1) Judgement auditor mengenai tingkat matrealitas.
- 2) Judgement auditor mengenai tingkat risiko audit.
- 3) Judgement auditor mengenai going concern.

Berikut pejelasan dari ketiga perbedaan tingkat judgment auditor :

1. Judgement auditor mengenai tingkat matrealitas.

Konsep matrealitas mengakui bahwa beberapa hal, baik secara individual atau keseluruhan adalah penting bagi kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia, sedangkan beberapa hal lainnya adalah tidak penting. Matrealitas memberikan suatu pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan audit mana yang tepat untuk di terbitkan dalam suatu kondisi tertentu.

Financial Accounting Standart Board (FASB) mendefinisikan matrealitas sebagai besarnya suatu penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dipandang dari keadaan-keadaan yang melingkupinya, memungkinkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi menjadi berubah atau

dipengaruhi oleh penghilangan atau salah saji tersebut. Definisi di atas mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berhubungan dengan satuan usaha (perusahaan klien), dan informasi yang diperlukan oleh mereka yang akan mengandalkan pada laporan keuangan yang telah di audit.

Implementasinya, merupakan suatu judgement yang cukup sulit untuk memutuskan beberapa matrealitas sebenarnya dalam suatu situasi tertentu. SPAP SA Seksi 312 menyebutkan bahwa pertimbangan auditor mengenai tingkat matrealitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan yang memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan.

Dalam merencanakan suatu audit, auditor harus mempertimbangkan matrealitas pada dua tingkatan, yaitu laporan keuangan dan tingkat saldo rekening. Idealnya, menentukan pada awal audit jumlah gabungan dari salah saji laporan keuangan yang dianggap material. Hal di atas pada umumnya disebut pertimbangan awal mengenai matrealitas karena menggunakan unsur *judgment* profesional dan masih dapat berubah jika sepanjang audit yang akan dilakukan ditemukan perkembangan baru

2. Judgement auditor mengenai tingkat risiko audit.

Seorang auditor dalam melaksanakan tugas audit, dihadapkan pada resiko audit yang dihadapinya sehubungan dengan judgement yang ditetapkannya. Dalam merencanakan audit, auditor harus menggunakan pertimbangannya dalam menentukan tingkat risiko audit yang cukup rendah dan pertimbangan awal

mengenai tingkat matrealitas dengan suatu cara yang diharapkan, dalam keterbatasan bawaan dalam proses audit, dapat memberikan bukti audit yang cukup untuk mencapai keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material (IAI,2001 : 312). Judgement auditor mengenai risiko audit dan matrealitas bersama dengan hal-hal lain, diperlukan dalam menentukan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil prosedur tersebut.

3. Judgment auditor mengenai going concern.

Kegagalan dalam mendeteksi kemungkinan ketidakmampuan klien untuk going concern, seperti kasus Enron dan WorldCom, menimbulkan social cost yang besar bagi auditor karena tingkat kepercayaan masyarakat menjadi menurun. Statement of audit standars (SAS) no. 59 yang dikeluarkan oleh American Institute of Certified Public Accountans (1998), merupakan pernyataan dari badan regulasi audi untuk mereskon keputusan going concern. SAS 59 menuntut auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat keraguan yang substansial pada kemampuan entitas terus berlanjut sebagai usaha yang going concern untk periode waktu yang layak pada setia penugasan audit. Secara umum SAS 59 membahas tentang going concern akan tetapi memberikan definisi operasional going concern. Sedangkan kepuusan going concern merupakan hal yang sulit, sehingga keputusan ini harus diambil oleh auditor yang memiliki keahlian yang memadai. Dengan kata lain keputusan audior mengenai going concern membutuhkan judgmenet auditor yang berpengalaman SAS 59 menuntut auditor untuk memperhatikan rencana, strategi, dan kemampuan manajemen klien untuk mengatasi kesulitan keuangan bisnis.

Auditor juga harus menilai keadaan dan kejadian lain dalam organisasi klien, dan juga berkaitan dengan perusahaan, perusahaan lain dalam sektor industri yang sama dan keadaan ekonomi secara umum. Auditor harus memonitor semua kejadian yang mempengaruhi keadaan keuangan klien, bahkan sebelum terdapat tingkat kesulitan yang signifikan pada keuangan klien. Auditor harus memperhatikan semua faktor yang terkait dengan entitas pada saat akan mengambil keputusan tentang going concern. Evaluasi kritis ini penting untuk memungkinkan auditor membuat penilaian yang akurat tentang kemampuan klien mempertahankan operasinya. Jika auditor mempunyai kesimpulan terhadap keraguan yang substansial tentang kelangsungan hidup suatu entitas, SAS 59 meminta auditor untuk mempertimbangkan pengaruhnya terhadap laporan keuangan dan apakah pengungkapan going concern tersebut sudah mencakupi.

2.2 Peneliti Sebelumnya

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti variabel-variabel yang mempengaruhi *Audit Judgment*. Variabel-variabel tersebut adalah pengalaman auditor, tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas terhadap *Audit Judgment*. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengalaman auditor, tekanan ketaatan serta kompleksitas tugas terhadap *Audit Judgment* diantaranya dikutip dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Peneliti Sekarang
1	Febrina Prima Putri (2015)	Pengaruh Pengetahuan Auditor, Pengalaman Auditor, Kompleksitas Tugas, <i>Locus Of Control</i> , dan Tekanan Ketaatan Terhadap <i>Audit Judgment</i> (Studi Kasus Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau)	Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap <i>audit judgement</i> . Pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>audit judgement</i> . Kompleksitas Tugas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>audit judgement</i> . <i>Locus Of Control</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>audit judgement</i> . Tekanan Ketaatan berpengaruh signifikan terhadap <i>audit judgement</i> .	- Objek tempat penelitian penulis pada KAP wilayah Kota Bandung - Variabel X2 peneliti terdahulu pada penulis menjadi variabel X1.
2	Kadek Evi Ariyantini, dkk (2014)	Pengaruh pengetahuan, tekanan ketaatan dan Kompleksitas tugas terhadap <i>audit judgment</i> (Studi Empiris Pada BPKP Perwakilan Provinsi Bali)	(1) pengetahuan berpengaruh terhadap <i>audit judgment</i> , (2) tekanan ketaatan berpengaruh terhadap <i>audit judgment</i> , (3) kompleksitas tugas berpengaruh terhadap <i>audit judgment</i> , dan (4) pengalaman auditor, tekanan ketaatan, dan kompleksitas tugas berpengaruh terhadap <i>audit judgment</i> .	- Objek tempat penelitian berbeda - Komponen dimensi tekanan ketaatan peneliti terdahulu hanya keadaan jasmani dan suasana lingkungan, sedangkan

				penulis menambahkan satu komponen yaitu faktor situasional.
3	Siti Jamilah dkk, 2007	Pengaruh <i>Gender</i> , Tekanan Ketaatan, dan Kompleksitas Tugas terhadap Audit <i>Judgment</i>	<i>Gender</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>judgment</i> , tekanan ketaatan berpengaruh signifikan terhadap <i>judgment</i> , kompleksitas tugas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>judgment</i> .	- Variabel X1 <i>Gender</i> peneliti terdahulu berbeda dengan variabel X1 penulis yaitu pengalaman auditor.
4	Zulaikha (2006)	Pengaruh Interaksi, <i>Gender</i> , Kompleksitas tugas dan Pengalaman Auditor terhadap Audit <i>Judgment</i>	sebagai auditor, peran ganda perempuan ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuratnya informasi yang diproses dalam membuat <i>Judgment</i> kompleksitas tugas tidak berpengaruh (<i>main effect</i>) signifikan terhadap keakuratan <i>judgment</i> , demikian pula ketika kompleksitas tugas berinteraksi (<i>interaction effect</i>) dengan peran <i>gender</i> , pengaruh tersebut juga tidak signifikan. Pengalaman auditor berpengaruh signifikan	- Variabel X1 peneliti terdahulu tidak diteliti penulis. - Komponen dimensi pengalaman auditor peneliti terdahulu hanya lamanya auditor bekerja dibidang audit, sedangkan penulis menambahkan komponen dimensi Banyaknya penugasan

				audit yang pernah ditangani
5	Dwi Oktaviani (2007)	Pengaruh <i>Gender</i> , Tekanan Ketaatan, dan Kompleksitas Tugas terhadap Audit <i>Judgment</i>	<i>Gender</i> berpengaruh negative terhadap audit <i>judgment</i> Tekanan Ketaatan berpengaruh negative terhadap audit <i>judgment</i> , karena kondisi tekanan ketaatan tidak mendominasi pada saat audit <i>judgment</i> Kompleksitas Tugas hanya memperkuat pengaruh <i>gender</i> terhadap audit <i>judgment</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel penelitian berbeda - objek tempat penelitian berbeda
6	Nurdiansyah dkk (2011)	Pengaruh Anggaran Waktu Audit, Kompleksitas Dokumen Audit dan Pengalaman Auditor Berpengaruh terhadap Pertimbangan Audit Sampling	Anggaran waktu audit, kompleksitas dokumen audit dan pengalaman auditor secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertimbangan audit sampling oleh auditor pada BPK-RI perwakilan Provinsi Banda Aceh	<ul style="list-style-type: none"> -Objek tempat penilitian berbeda dengan penulis. -Variabel X1 peneliti terdahulu tidak diteliti oleh penulis.

Sumber : berbagai penelitian (diolah)

Ada beberapa perbedaan dari penelitian-penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Perbedaan tersebut terletak pada variabel yang digunakan penulis maupun peneliti trdahulu. Selain perbedaaan pada variabel yang digunakan, objek penelitian serta periode yang penulis lakukan juga berbeda. Pada

penelitian ini akan dibahas mengenai pengaruh pengalaman auditor, tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas terhadap audit *judgment*. Objek penelitian yang akan diteliti adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung.

2.2.1 Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Audit *Judgment*

Pengalaman sebagai salah satu variabel yang banyak digunakan dalam berbagai penelitian. Bahwa secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas (*job*). Penggunaan pengalaman didasarkan pada asumsi bahwa tugas yang dilakukan secara berulang-ulang memberikan peluang untuk belajar melakukannya dengan yang terbaik.

Pengaruh pengalaman auditor terhadap audit *judgment* menurut Mulyadi (2008:83) adalah sebagai berikut :

“Pengalaman mengarah kepada proses pembelajaran dan penambahan potensi bertingkah laku dari pendidikan formal maupun nonformal atau bisa diartikan sebagai suatu proses peningkatan pola tingkah laku. Bahwa terdapat pengaruh positif antara pengalaman dengan *judgment* auditor. Banyaknya pengalaman dalam bidang audit dapat membantu auditor dalam menyelesaikan tugas yang cenderung memiliki pola yang sama.”

Suartana dan Kartana (2007) menunjukkan bahwa :

“Pengalaman audit mempunyai peranan yang penting dalam menanggapi bukti audit. Individu yang kurang mengenal dengan suatu keputusan berisiko, berperilaku secara lebih berhati-hati dan lebih menghindari risiko dibandingkan mereka yang lebih mengenal dengan tugas itu.”

Maka dapat diartikan bahwa auditor yang kurang familiar atau kurang berpengalaman terhadap suatu tugas pertimbangan akan lebih berorientasi pada bukti negatif daripada auditor yang mempunyai pengalaman yang lebih banyak.

2.2.2 Pengaruh Tekanan Ketaatan terhadap Audit Judgment

Tekanan ketaatan pada etika profesional pada penelitian ini mengacu pada situasi konflik dimana auditor mendapat tekanan dari atasan maupun entitas yang diperiksa untuk melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari standar, sehingga terjadi dilema etika yang mengharuskan auditor menggunakan sikap profesional dan taat pada aturan etika profesionalnya. Indikator-indikator yang relevan dengan tekanan ketaatan pada etika profesional Auditor yang profesional akan menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan laporan hasil audit yang berkualitas bagi para pemakainya.

Menurut Mangkunegara (2013:66) menunjukkan bahwa :

“Auditor yang mendapatkan perintah tidak tepat baik dari atasan maupun entitas yang diperiksa cenderung akan berperilaku menyimpang dari standar profesional. Sehingga tekanan ketaatan berpengaruh secara signifikan terhadap judgment yang diambil oleh auditor.”

Ade Rahayu (2014) mengatakan sebagai berikut :

“Untuk menghasilkan suatu pertimbangan audit yang baik seorang auditor harus taat terhadap etika professional. Ketaatan pada etika profesional dalam membuat pertimbangan ini dibutuhkan karena seorang auditor yang memiliki etika professional akan bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat menyangkut pertimbangan audit tersebut.”

Seorang auditor sering mengalami dilema dalam penerapan standar profesi auditor pada pengambilan keputusannya. Kekuasaan klien dan pemimpin

menyebabkan auditor tidak independen lagi, karena ia menjadi tertekan dalam menjalankan pekerjaannya. Klien atau pimpinan dapat saja menekan auditor untuk melanggar standar profesi auditor. Hal ini tentunya akan menimbulkan tekanan pada diri auditor untuk menuruti atau tidak menuruti dari kemauan klien maupun pimpinannya. Sehingga terkadang tekanan ini dapat membuat auditor mengambil tindakan yang melanggar standar pemeriksaan.

Menurut Jamilah, dkk (2007) mengatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan tugas audit, auditor secara terus menerus berhadapan dengan dilema etika yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi seperti ini, entitas yang diperiksa dapat mempengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan auditor dan menekan auditor untuk mengambil tindakan yang melanggar standar pemeriksaan.”

Praditaningrum (2012) menyatakan bahwa tekanan ketaatan mengarah pada tekanan yang berasal dari atasan atau dari auditor senior ke auditor junior dan tekanan yang berasal dari entitas yang diperiksa untuk melaksanakan penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Made Julia Drupadi (2015) menunjukkan bahwa jika seorang auditor mendapat tekanan dari atasan maka audit *judgment* yang diambil akan tidak akurat karena dalam menghasilkan *judgment*, auditor yang mendapat perintah akan cenderung memenuhi keinginan atasan walaupun bertentangan dengan standar profesional akuntan publik. Auditor dengan tipe ini tidak akan mau mengambil resiko karena menentang perintah atasan dan permintaan klien dan auditor akan berperilaku *disfungsional*. Pernyataan tersebut didukung oleh (2012) yang menyatakan bahwa

seorang auditor akan cenderung melanggar aturan saat adanya tekanan ketaatan yang hasilnya nanti dapat menyebabkan pengaruh terhadap audit *judgment*.

Ade Rahayu (2014) menunjukkan bahwa tekanan ketaatan pada etika profesional berpengaruh secara signifikan positif terhadap pertimbangan audit juga memberikan bukti bahwa tekanan ketaatan dapat memengaruhi auditor dalam membuat suatu *judgment*. Jamillah (2007) menyatakan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh secara signifikan terhadap audit *judgment*.

2.2.3 Pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Audit Judgment

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas kerja seseorang adalah tingkat kerumitan pekerjaan yang dihadapi. Kompleksitas kerja dapat dijadikan alat dalam meningkatkan kualitas hasil pekerjaan. Dalam arti kata untuk tingkat kerumitan pekerjaan tertentu dapat mempengaruhi usaha yang dicurahkan oleh auditor.

Menurut Bonner (2006:67) mengatakan pengaruh kompleksitas tugas terhadap audit *judgment* adalah sebagai berikut :

“Kompleksitas tugas dapat menurunkan usaha atau motivasi seseorang, dan meningkatkan atau menurunkan usaha yang diarahkan untuk pengembangan strategi, dan juga dapat mengakibatkan menurunnya kinerja dalam membuat *judgment* pada hasil audit nya. Kompleksitas tugas merupakan tugas yang tidak terstruktur. Kompleksitas tugas merupakan bentuk tugas yang kompleks, terdiri dari banyak bagian dan saling terkait satu sama lain.”

Seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari tugas-tugas yang banyak dan kompleks. Kompleksita tersebut dalam berbagai macam penelitian

ini dinilai bisa berpengaruh signifikan terhadap hasil judgment seorang auditor, namun berbagai macam penelitian lain tidak ada pengaruh signifikan suatu kompleksitas tugas yang dialami auditor terhadap judgment audit.

Auditor selalu dihadapkan dengan tugas yang banyak dan berbeda-beda dan saling terkait satu sama lain. Ada beberapa pendapat menyatakan pengertian dari kompleksitas tugas itu sendiri diantaranya.

Suatu tugas yang dikerjakan seseorang menunjukkan bahwa terdapat sesuatu yang hendak dicapai dan mempunyai maksud tertentu. Fungsi dari tugas itu sendiri tergantung pada tujuan awal orang tersebut melaksanakan tugas. Biasanya dalam satu organisasi (dalam hal ini di Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung) seseorang melakukan lebih dari satu tugas yang dia kerjakan. Tugas-tugas tersebut menjadi sesuatu yang kompleks karena masing-masing dari pekerjaannya terdapat fungsi tertentu.

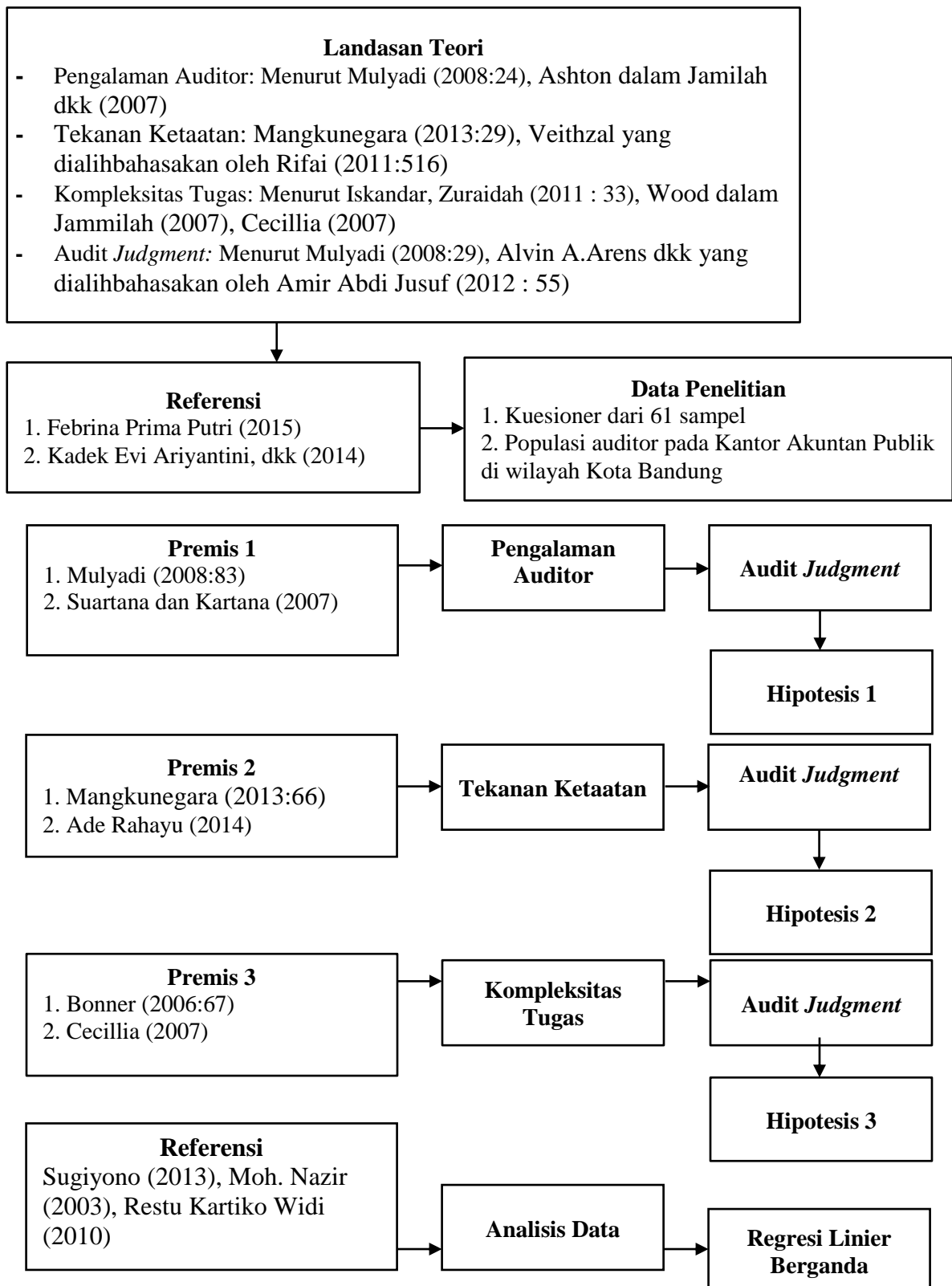
Menurut Widiastuti dalam Veronica (2006) yang mengatakan pengaruh kompleksitas tugas terhadap audit *judgment* yaitu sebagai berikut :

“Kompleksitas tugas merupakan sebagai tugas yang tidak terstruktur, membingungkan dan sulit, akan tetapi berpengaruh dalam pengambilan *judgment*” untuk hasil audit nya.”

Tugas yang banyak dan tidak terstruktur menjadikan orang mengerjakannya semakin bingung, sehingga tugas tersebut sulit untuk dikerjakan dengan benar. Hal

tersebut tidak hanya dialami oleh seorang auditor tetapi juga semua orang yang berhadapan dengan tugas semacam itu. Hal ini menjadikan ganjalan dalam usaha untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.

Terdapat dua aspek penyusunan dari kompleksitas tugas, yaitu tingkat kesulitan tugas dan struktur tugas. Tingkat sulitnya tugas selalu dikaitkan dengan banyaknya informasi tentang tugas tersebut, sementara struktur adalah terkait dengan kejelasan informasi (*information Clarity*). Menurut Bonner dalam Siti Jamillah (2007), proses pengolahan informasi terdiri dari tiga tahapan, yaitu: *input*, *proses*, *output*. Pada tahap *input* dan *proses*, kompleksitas tugas meningkat seiring bertambahnya faktor petunjuk



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2013:93) adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, menjadi landasan bagi penulis untuk mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh pengalaman auditor terhadap audit *judgment* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung.
2. Terdapat pengaruh tekanan ketaatan terhadap audit *judgment* yang dihasilkan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung.
3. Terdapat pengaruh kompleksitas tugas terhadap audit *judgment* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung.

Terdapat pengaruh pengalaman auditor, tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas terhadap audit *judgment* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung